

Kebijakan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

¹Irdhatul Amalia, ²Basri, ³Siradjuddin, ⁴Alwan Suban

^{1,2,3,4}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
e-mail: irdhaamalia99@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to outline the concept of education financing policy and management. This study uses qualitative research with a literature study research method. The data in this study come from relevant literature, books and journals related to the subject of this article. This study discusses several main problems, namely: 1) the concept of an effective and efficient financing system in education; 2) education budget and financial management; 3) the management system of financing for the implementation of education; 4) education financing models. After collecting data from several relevant literature, the data is researched, reviewed, described, developed and innovated from previous research. Education financing policy and management aims to create an efficient and effective system, as well as ensure access to quality education for each individual through optimal resource management. This aspect is very important because it has a direct effect on the quality of education. With clear regulations and good management, it is hoped that education financing can be managed in an effective way to improve the quality of education services at all levels.

Keywords: Policy, Management, Education Financing

PENDAHULUAN

Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara harus memprioritaskan alokasi dana pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketentuan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa dana pendidikan harus dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Santoso, 2021).

Alokasi anggaran sebesar 20% ini seharusnya digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam bidang pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan fasilitas fisik seperti gedung sekolah, alat belajar, dan akses ke teknologi pendidikan. Selain itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan kesejahteraan guru, serta mendukung program-program pendidikan yang inovatif. Pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan pendidik (Fitriani & Tohiri, 2024). Meskipun dana yang tersedia di sekolah cukup besar, tanpa adanya tata kelola yang baik dan manajemen yang efektif, sekolah tersebut dapat mengalami kemunduran dan penurunan kualitas. Manajemen finansial merupakan aktivitas yang melibatkan pengadaan sumber dana, pemanfaatan dana, dan pengelolaan aset secara

efisien, yang memerlukan penetapan tujuan dan target tertentu (Harjito dalam Mujahidin *et al.*, 2022).

Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Wilayah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan mencakup pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk penanganan kekurangan dan pemanfaatan kelebihan kas. Sebagai lembaga pemerintah, sekolah berada di bawah pengawasan kepala sekolah, dan peraturan pemerintah juga menekankan pentingnya pengendalian internal serta pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsip-prinsip tata kelola keuangan sekolah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Mujahidin *et al.*, 2022).

Untuk mengevaluasi apakah pengelolaan biaya pendidikan telah efektif, diperlukan transparansi keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Selain itu, transparansi juga berfungsi untuk membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan komunitas sekolah dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi keuangan, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), perlu dipublikasikan secara terbuka, contohnya dengan menampilkannya di papan pengumuman atau di depan ruang tata usaha agar dapat diakses oleh seluruh warga sekolah dan orang tua siswa yang memerlukannya (Jannah, 2024).

Adanya peraturan kebijakan dan manajemen pembiayaan yang efektif, diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu artikel ini akan membahas mengenai kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yaitu metode yang melibatkan penelaahan referensi dan evaluasi kembali literatur yang telah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti (Samsuri dalam Hadi & Afandi, 2021).

Dari sumber tersebut diteliti, ditelaah, dideskripsikan, dikembangkan, dan di inovasi dari penelitian sebelumnya. Setelah membaca dan mencatat terkait temuan-temuan yang penting sesuai fokus penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan penelitian secara deskriptif

untuk memberikan makna secara mendalam sesuai fokus masalah, yaitu tentang kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Pembiayaan yang Efektif dan Efisien dalam Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah salah satu bentuk sumber daya, baik berupa uang, tenaga, maupun barang, yang secara langsung mendukung efektivitas dan implementasi pengelolaan pendidikan (Sudarmono *et al.*, 2021). Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hasil yang sejalan dengan visi dan misi suatu lembaga. Manajemen keuangan dianggap efektif jika sebuah lembaga dapat mengatur dan mengelola keuangannya untuk memenuhi semua kebutuhan demi mencapai tujuan yang telah dirumuskan, serta memastikan bahwa pengeluaran tidak menyimpang dari rencana awal. Sedangkan, efisiensi mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam suatu lembaga. Efisiensi juga dapat dipahami sebagai penggunaan sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan biaya, serta hasil dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks penyelenggaraan program di lembaga pendidikan, efisiensi tercapai ketika waktu, tenaga, dan biaya digunakan secara optimal untuk memenuhi semua kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari segi hasil kegiatan, manajemen pembiayaan dinilai efisien jika pemanfaatan waktu, tenaga, dan biaya dilakukan secara maksimal, sehingga dapat menghasilkan output dengan kualitas dan kuantitas terbaik (Komariah dalam Bashori & Putri, 2022).

Untuk mengetahui efisiensi dalam pembiayaan pendidikan, umumnya digunakan metode analisis keefektifan biaya (*cost effectiveness method*) yang menghitung kontribusi setiap input pendidikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Usaha untuk mencapai efisiensi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Sebuah sistem pendidikan dianggap memiliki efisiensi internal jika mampu menghasilkan output yang diinginkan dengan biaya yang paling rendah. Di sisi lain, efisiensi eksternal sering kali terkait dengan metode analisis biaya-manfaat (*cost benefit analysis*), yang merupakan perbandingan antara keuntungan finansial dari pendidikan (biasanya diukur melalui pendapatan) dan total biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan tersebut (Rahman, 2017).

Dalam mengatasi tantangan keterbatasan dana di sekolah/madrasah yang menghadapi beragam kebutuhan, sekolah/madrasah perlu mengambil keputusan yang tetap berfokus pada peningkatan kualitas. Ketika madrasah dihadapkan pada kebutuhan dengan anggaran yang terbatas, penting untuk mempertimbangkan skala prioritas yang diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka mengelola dana pendidikan secara efektif dan efisien serta memperhatikan prioritas dari ketersediaan dana, pimpinan lembaga

harus menggunakan manajemen strategis untuk mengarahkan operasi internal organisasi, termasuk alokasi sumber daya manusia, sarana fisik, dan keuangan. Sebagai langkah konkret dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepala madrasah dapat melakukan beberapa strategi berikut: 1) melakukan analisis terhadap potensi sumber dana baik dari internal maupun eksternal; 2) mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan; 3) menetapkan sumber-sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua siswa baru di awal tahun ajaran, diskusi dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah, serta menggali partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah (Mujayaroh & Rohmat, 2020).

Agar mencapai pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien, Lembaga pendidikan harus mampu mengelola sumber daya finansial dengan baik dan optimal agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas.

Anggaran dan Manajemen Keuangan Pendidikan

Anggaran dapat dipahami sebagai rencana operasional untuk suatu kegiatan atau proyek yang mengindikasikan jumlah pengeluaran yang direncanakan dalam periode tertentu (Milah et al., 2024). Anggaran terdiri dari dua komponen utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup dana yang diterima oleh lembaga dari berbagai sumber, yang biasanya dibedakan dalam kategori seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber lainnya dalam konteks pembiayaan pendidikan. Sementara itu, pengeluaran mencakup semua penerimaan biaya yang digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, ketatausahaan, serta sarana dan prasarana Pendidikan (Nanang Fattah dalam Batubara, 2022). Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi juga sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan organisasi dalam menilai posisi kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, anggaran juga berperan sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk memotivasi dan mempengaruhi manajer serta karyawan agar bertindak secara efisien dalam mencapai sasaran Lembaga (Makmun dalam Batubara, 2022).

Dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan merupakan elemen penting dalam manajemen sekolah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan. Seperti halnya dalam manajemen pendidikan secara umum, manajemen keuangan melibatkan penetapan dan pengadaan sumber dana, penggunaan dana, pelaporan, audit, dan akuntabilitas. Manajemen keuangan di sekolah adalah bagian dari pembiayaan pendidikan yang menuntut kemampuan institusi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan cara yang efektif dan transparan (Iskandar dalam Widodo *et al.*, 2023).

Manajemen keuangan pendidikan mencakup beberapa aspek penting yang dapat dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. Perencanaan (Finansial)

Perencanaan dalam manajemen keuangan pendidikan sering kali disebut sebagai penganggaran. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pimpinan dan staf untuk menentukan alokasi dana yang diperlukan. Fungsi utama dari penganggaran adalah sebagai alat perencanaan dan pengendalian, serta membantu manajemen dalam mengarahkan lembaga pendidikan. Penyusunan anggaran memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya yang diperlukan untuk setiap satuan kegiatan.

2. Pelaksanaan (Akunting)

Tahap pelaksanaan mencakup penerimaan dan penggunaan dana di sekolah. Semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat dan dikelompokkan dengan sistem akuntansi yang baik. Akuntansi berfungsi untuk mencatat informasi keuangan yang penting bagi pelaksanaan kegiatan, serta membantu dalam efisiensi dan penilaian akhir dari aktivitas organisasi. Dalam konteks pendidikan, akuntansi digunakan untuk merencanakan pengelolaan dana secara efektif dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntansi, dari sudut pandang kegiatannya, dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang mencakup pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, dan analisis data keuangan suatu organisasi. Dalam konteks Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM), tujuan dari akuntansi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan lembaga pendidikan tersebut.

3. Penilaian/evaluasi (auditing)

Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses manajemen keuangan pendidikan setelah perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kesalahan dalam penggunaan dana. Evaluasi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kesalahan tidak terulang di masa mendatang. Dalam konteks sekolah, evaluasi keuangan diidentifikasi melalui pendekatan pengendalian alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan, dan keterlibatan pengawas sekolah. (Widodo *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, manajemen keuangan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Sistem Pengelolaan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan utama dari pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat meningkatkan produktivitas yang berkualitas dalam proses belajar mengajar (Adriansyah & Maftuhah, 2023). Pengelolaan dana pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan pendidikan yang tercantum dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). RKS/RKM adalah rencana kerja berdurasi empat tahun yang

disusun oleh kepala madrasah, guru, pegawai, dan komite sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari RKM, akan disusun Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, yang kemudian direalisasikan dalam RAPBM. (Anwar Arifin dalam Mujayaro & Rohmat, 2020).

Pengelolaan biaya pendidikan di lembaga pendidikan umumnya dilakukan oleh bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tugas bendahara BOS mencakup pengaturan dan pertanggungjawaban dalam perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan. Untuk menjalankan tugas ini, bendahara harus memiliki integritas tinggi, kejujuran, loyalitas, kualitas, keterbukaan, ketegasan, dan transparansi. Bendahara juga perlu memahami tiga tahap dalam manajemen pembiayaan: perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (akunting), dan evaluasi atau auditing (Kurniatin & Haryati, 2023).

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah proses sistematis dan strategis untuk mengelola keuangan demi mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan ini meliputi:

- a) Identifikasi Sumber Pembiayaan: Menentukan sumber dana yang akan digunakan, seperti dana pemerintah, pribadi, atau bantuan.
- b) Penghitungan Kebutuhan Keuangan: Menghitung total biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, termasuk gaji guru dan sarana prasarana.
- c) Alokasi Dana: Memilah dana untuk berbagai komponen pendidikan seperti gaji guru dan pengembangan kurikulum.
- d) Penganggaran: Menyusun anggaran rinci yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran.
- e) Evaluasi dan Penilaian: Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi kekurangan dan solusi.
- f) Strategi Pembiayaan: Mencari cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan melalui pinjaman atau kemitraan.
- g) Kebijakan dan Peraturan: Mematuhi kebijakan yang mengatur penggunaan dana pendidikan.
- h) Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin penggunaan dana sesuai rencana untuk membangun kepercayaan.

2. Akuntansi

Akuntansi dalam konteks pembiayaan pendidikan mencakup pencatatan, pelaporan, analisis, dan pengolahan transaksi keuangan terkait pendidikan. Tujuan utama akuntansi adalah: a) Pencatatan Keuangan: Melacak semua transaksi keuangan terkait anggaran pendidikan. b) Pelaporan Keuangan: Menyajikan data keuangan secara terstruktur untuk pemahaman pihak

berkepentingan. c) Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas: Menganalisis penggunaan dana untuk mencapai tujuan pembelajaran. d) Perencanaan Keuangan: Membantu merencanakan penggunaan biaya pendidikan jangka menengah dan panjang. e) Kepatuhan Hukum: Memastikan semua aktivitas keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. f) Pengendalian Keuangan: Mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan program yang direncanakan. g) Audit dan Pemeriksaan: Melakukan audit untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan dan kenyataan.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam pembiayaan pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan dana. Komponen penting dalam evaluasi meliputi: pengumpulan data, analisis data, penilaian dampak, perbandingan dengan tujuan, rekomendasi perbaikan, serta pelaporan dan komunikasi. Evaluasi bertujuan memastikan akuntabilitas penggunaan dana, memaksimalkan efisiensi pengeluaran, serta membantu pengambilan keputusan terkait keberhasilan program-program pendidikan (Kurniatin & Haryati, 2023).

Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang efektif meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Hal tersebut akan memastikan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik, memenuhi kebutuhan siswa, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dalam pembiayaan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Model-Model Pembiayaan Pendidikan

Terdapat empat model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) Subsidi penuh dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 2) Pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan tinggi yang diberikan kepada peserta didik hingga usia tertentu. 3) Pendidikan gratis sampai tingkat SMA, sementara untuk pendidikan tinggi tetap dikenakan biaya SPP meskipun masih mendapatkan subsidi. 4) Pembiayaan mandiri di mana semua jenjang pendidikan harus membiayai diri sendiri (Mesiono & Roslaeni, 2021).

Menurut Thomas H. Jones dalam Desimarnis, (2021) berpendapat bahwa terdapat enam model pembiayaan pendidikan yang diidentifikasi, yaitu:

1. *Flat Grant*. Model ini merupakan bentuk bantuan keuangan yang paling awal dan sederhana, di mana setiap Madrasah menerima jumlah dana yang sama, dihitung per siswa atau unit pendanaan lainnya. Model ini berfungsi dengan baik dalam situasi politik yang mendukung kesetaraan bantuan, tanpa memandang kekayaan daerah atau tarif pajak yang diterapkan.
2. *Power Equalizing*. Dalam model ini, daerah kaya diwajibkan untuk menyetorkan sebagian pajak sekolah yang mereka kumpulkan kembali ke pemerintah negara bagian. Dana tersebut

kemudian digunakan untuk meningkatkan bantuan kepada daerah yang kurang mampu. Setiap daerah menerima jumlah dana yang bervariasi berdasarkan kapasitas pendapatan mereka.

3. *Complete State Model*. Model ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan lokal dalam hal pengeluaran dan pajak pendidikan. Tidak ada pajak properti lokal untuk Madrasah, dan tanggung jawab keuangan pendidikan dikelola secara merata di tingkat negara bagian.
4. *Foundation Plan*. Model ini dirancang untuk mengatasi empat isu utama dalam pendidikan dan keuangan: kesetaraan pengeluaran, penetapan standar pajak dan pengeluaran minimum, pemisahan wewenang antara pemerintah daerah dan negara bagian, serta perbaikan berkelanjutan dalam proses pendidikan. Negara menetapkan batas minimum biaya per siswa dan tarif pajak minimum yang harus diterapkan oleh semua distrik Madrasah.
5. *Guaranteed Percent Equalizing*. Model ini mengatur bahwa negara akan membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik Madrasah. Persentase dukungan negara lebih tinggi untuk daerah yang kurang mampu dan lebih rendah untuk daerah kaya, dengan tujuan meningkatkan kesetaraan dalam pembiayaan pendidikan.
6. *Complete Local Support*. Dalam model ini, seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah, dengan harapan bahwa semua sumber dana berasal dari pemerintah setempat.

Setiap model pembiayaan memiliki karakteristik unik dan dapat diterapkan sesuai dengan konteks lokal. Model-model ini mencerminkan berbagai pendekatan dalam pembiayaan pendidikan, masing-masing model-model pembiayaan pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan maka dari itu penting bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif, serta memastikan akses pendidikan berkualitas bagi setiap individu melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Aspek ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan manajemen yang baik, diharapkan pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan cara yang efektif untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di semua jenjang.

Demikian pembahasan terkait kebijakan dan manajemen pembiayaan pendidikan. Kami menyadari bahwa artikel ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan dari pembaca sekalian demi kesempurnaan artikel ini. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak referensi terkait topik pembahasan pada artikel ini

agar topik pembahasan ini berkembang dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, H., & Maftuhah. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i1.623>
- Bashori, & Putri, D. A. (2022). The Relationship of Education Financing Management to Effectiveness and Efficiency in the Learning Process. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 51–64. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.42>
- Batubara, H. (2022). ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>
- Desimarnis. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(5), 2559–2572. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.681>
- Fitriani, Y., & Tohiri, M. K. (2024). Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Islam (Literature Review). *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 23–31. <https://jippp.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/7>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Jannah, S. N. (2024). Pengelolaan Biaya Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QAZI : Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 30–36. <http://ejournal.hsnpublisher.id/index.php/qazi/article/view/3>
- Kurniatin, Y., & Haryati, T. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 4(1), 47–55. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpt/article/view/23696>
- Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). MODEL-MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.10>
- Milah, A. R., Hasanah, U., & Nurhidayat, R. (2024). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK Negeri 1 Cijulang dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisilin*, 2(2), 183–188. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i2.574>

- Mujahidin, A. A., Setiawan, F., Astiyani, H. D., Listiyani, A., & Alyautami, L. (2022). Optimalisasi Manajemen Keuangan di MA Darul Ulum Muhammadiyah Galur. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 119–124. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.59>
- Mujayaroh, & Rohmat. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Rahman, A. (2017). Efisiensi dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87–102. <https://ojs.unm.ac.id/Eklektika/article/view/6552>
- Santoso, M. S. A. F. (2021). ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA(APBN) TERHADAP PENDANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 31–36. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2), 146–167. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i2.548>